

ISRAEL DAN PROGRAM NUKLIR IRAN

Humphrey Wangke

7

Abstrak

Revolusi Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini tahun 1979 telah mengubah Iran sebagai negara yang tidak sejalan dengan nilai-nilai liberal dan sekuler modern, yang menjadi ciri khas model universal Barat dari demokrasi liberal. Dengan pandangan seperti itu, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan kawasan maupun global. Apalagi setelah menandatangani perjanjian JCPOA tahun 2015, perekonomian Iran maju pesat karena dihapusnya berbagai sanksi ekonomi yang diberlakukan sejak 1979. Kemajuan Iran tersebut memberinya kesempatan memperluas daerah pengaruh. Tulisan ini menganalisis sikap Israel yang selalu berusaha melakukan sabotase terhadap instalasi nuklir Iran di Natanz karena dianggap instalasi itu bukan untuk tujuan sipil, tapi kepentingan militer. Israel tidak menginginkan ada negara lain di Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir karena akan mengancam dominasi militernya di Timur Tengah, dan bahkan akan mengancam eksistensinya. Sabotase dianggap sebagai pilihan terbaik karena pendekatan secara diplomasi akan sulit menghentikan keinginan Iran untuk memiliki senjata nuklir.

Pendahuluan

Pada hari ketika Iran hendak mengaktifkan sentrifugal terbaru di Natanz, yang dirayakan sebagai “lompatan jauh dalam upaya memperkaya uranium di dalam negeri”, tiba-tiba listrik di instalasi nuklir tersebut padam. Iran segera menuduh Israel bertanggung jawab atas insiden tersebut. Akibat sabotase itu program pengayaan uranium Iran seolah mundur beberapa bulan.

Bukan kali pertama pembangkit nuklir Iran di Natanz mengalami aksi sabotase. Pada tahun 2010, sebuah virus komputer

bernama Stuxnet melumpuhkan sentrifugal di Natanz. Serangan itu diyakini merupakan operasi gabungan Israel dan Amerika Serikat (AS). Hingga kini, fasilitas nuklir di provinsi Isfahan itu masih menjadi episentrum kekhawatiran Israel. Tidak hanya menargetkan fasilitasnya, Israel juga diduga berupaya menggagalkan program nuklir Iran dengan membunuh ahli atom ternama negara Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada November 2020. Israel menyatakan program energi nuklir untuk pembangkit listrik yang dikelola Iran hanya kamufase untuk menutupi program pembuatan



senjata pemusnah massal.

Iran tidak mengendurkan tekad untuk memproduksi senjata nuklir. Upaya sabotase Israel terhadap program nuklirnya dijawab Iran dengan menaikkan tingkat pengayaan uranium menjadi 60% dan sudah mengirim surat resmi ke Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) mengenai keputusannya itu. Dengan 60% tingkat pengayaan uranium berarti Iran tinggal membutuhkan 30% lagi untuk mampu membuat senjata nuklir.

Meskipun belum ada kepastian kapan pengayaan uranium itu akan dimulai, namun keputusan itu memberi kesempatan pada Iran untuk mengabaikan perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* tahun 2015 yang membatasi kegiatan nuklirnya. Berdasarkan perjanjian itu, Iran harus mengizinkan IAEA untuk mengawasi kegiatan program nuklirnya, dan Iran hanya boleh memperkaya uranium hingga 3,67%. Angka ini jauh dari yang diperlukan untuk mengembangkan senjata nuklir yaitu 90%. Dengan kondisi seperti itu, artikel ini akan menganalisis, mengapa Israel ingin menggagalkan program nuklir Iran?

Iran dan Pengaruhnya di Kawasan

Kebijakan Iran di kawasan Timur Tengah dianggap menjadi salah satu pemicu demonstrasi besar selama awal 2018. Massa pengunjuk rasa meneriakkan kata-kata “Bukan Gaza, Bukan Suriah, Bukan Lebanon”, sebagai sebuah bentuk protes atas prioritas kebijakan pemerintahnya yang terus melibatkan diri dalam ketegangan di ketiga wilayah tersebut. Kebijakan

luar negeri Iran merupakan produk pelbagai kepentingan antar-elemen yang saling bersaing yaitu antara kepentingan nasional, persepsi para pemimpin bahwa Iran terancam, serta interaksi rezim dengan pelbagai faksi dan konstituen.

Menurut Kenneth Katzman dalam *“Iran’s Foreign and Defense Policies”*, Iran sebetulnya telah mendapatkan momentum untuk mengembangkan pengaruh di kawasan Timur Tengah sejak runtuhnya Uni Soviet (1991), Taliban (2001) dan Saddam Husein (2002). Fenomena *Arab Spring* turut menjadi katalis bagi Iran untuk semakin memperluas pengaruhnya. Iran menilai keterlibatan negara-negara Barat dalam konflik di Suriah serta lahirnya ISIS merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup mereka. Pada saat bersamaan, ketidakstabilan sejumlah negara Arab akibat gerakan prodemokrasi menjadikan Iran sebagai *state actor* yang dominan di kawasan.

Terpilihnya Hassan Rouhani sebagai Presiden Iran pada 2013, bisa dikatakan menjadi pintu bagi Iran untuk mencapai hegemoni di kawasan. Dalam kampanyenya, Rouhani berjanji untuk menjadikan Iran lebih diterima oleh masyarakat internasional. Salah satunya adalah mencapai kesepakatan nuklir dengan AS tahun 2015. Ia menilai kesepakatan ini akan mendorong pencabutan sanksi ekonomi Barat terhadap Teheran sehingga terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kinerja perekonomian Iran.

Iran berhasil mencapai kesepakatan dengan negara-negara Barat tentang pengelolaan nuklir yang dimilikinya, yaitu AS, Perancis, China, Rusia, Jerman, dan Uni Eropa

melalui JCPOA pada Juli 2015. Perjanjian ini dimaksudkan untuk menciptakan program nuklir Iran yang aman dan dapat dimonitor setiap saat oleh IAEA. Sebagai imbalannya, seluruh sanksi Dewan Keamanan PBB dan negara-negara di dunia terhadap Iran dicabut. Sanksi ekonomi AS sejak terjadi Revolusi Iran (1979) juga dicabut pada tahun 2015.

Dalam artikel "*Iran's geopolitics in Eurasia after the nuclear deal*", Noemi M. Rocca menyebutkan, kesepakatan nuklir itu benar-benar menjadi titik balik bagi posisi Iran di kancah geopolitik Timur Tengah. Sebab, setelah perjanjian ini ditandatangani, sejumlah negara di dunia mengikuti langkah AS mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran, termasuk pencairan aset Iran senilai puluhan miliar dolar AS. Sejak tahun 2016 Iran berubah menjadi negara eksportir minyak terbesar nomor 2 di kawasan Timur Tengah dan menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan.

Kembali ke kekuatan perekonomian Iran mendorong negara itu untuk memperkuat hegemoni dengan membantu negara-negara di kawasan baik secara ekonomi maupun militer. Pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah menjadi negara yang paling banyak memperoleh bantuan ekonomi dan militer dari Iran. Hasrat memperluas pengaruh di kawasan semakin terlihat ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, pada Juli 2016 menyertakan program pengembangan rudal balistik dalam rencana pertumbuhan Iran 2016-2021. Rencana ini kemudian disetujui oleh mayoritas anggota parlemen

Iran pada Januari 2017 dengan menambahkan dana militer hingga 5% dari keseluruhan APBN Iran. Pada Juni 2017, untuk kali pertama, Iran meluncurkan rudal balistik yang menghantam markas ISIS di Suriah.

Perebutan Hegemoni Israel-Iran di Timur Tengah

Sejak revolusi Iran terjadi pada tahun 1979, Iran dipandang oleh negara Barat sebagai negara yang sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai liberal dan sekuler modern, yang menjadi ciri khas model universal Barat dari demokrasi liberal. Dengan pandangan seperti itu, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Lebih dari itu, Iran tidak pernah menyembunyikan intensitasnya terhadap Israel. Akibatnya Israel sulit menerima program nuklir Iran. Oleh karena itu Israel akan melancarkan serangan pendahuluan sebelum Iran benar-benar memperoleh kemampuan senjata nuklir seperti yang telah disaksikan dalam kasus Osirak di Irak.

Hubungan Israel dan Iran mulai terganggu ketika Presiden Ahmadinejad berulang kali membantah adanya *Holocaust* dan mengancam akan menghapus negara Yahudi dari peta. Perang antara Israel dengan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon pada musim panas 2006 mempertegas kekhawatiran Israel terhadap Iran, yaitu Iran yang bersenjata nuklir tidak hanya akan menantang monopoli Israel atas senjata nuklir di Timur Tengah, tetapi juga akan memperkuat *proxy* Iran di Lebanon dan Palestina untuk menyerang

Israel. Sejak saat itu, PM Israel Benyamin Netanyahu menyatakan penolakannya bila Iran memiliki kemampuan nuklir dan mulai menganggap Iran sebagai ancaman terhadap eksistensi Israel.

Untuk mendapat dukungan internasional atas kampanyenya yang menolak program nuklir Iran, PM Netanyahu menegaskan bahwa Iran yang bersenjata nuklir adalah ancaman, bukan hanya bagi Israel tetapi juga bagi kawasan dan seluruh dunia, dan ancaman itu jauh lebih parah daripada terorisme. Namun Israel kesulitan mendapatkan dukungan internasional sehingga hanya ada 2 alternatif yang dapat dilakukan Israel, pertama, tetap mengandalkan masyarakat internasional untuk menyelesaikan nuklir Iran melalui meja perundingan, atau kedua, menyerang fasilitas nuklir Iran. Melihat perkembangannya, Israel telah memilih yang terakhir.

Masalah nuklir Iran telah lama menjadi salah satu konflik internasional yang paling kontroversial. Tidak adanya informasi yang akurat, terutama kurangnya pemahaman tentang niat dan perhitungan dari masing-masing negara, hanya akan melahirkan banyak tindakan di tingkat internasional, regional dan nasional. Selama bertahun-tahun program nuklir Iran telah menjadi bahan spekulasi internasional yaitu untuk kepentingan damai atau untuk senjata nuklir? Pertanyaan ini yang mendorong Israel untuk terus melakukan sabotase terhadap program nuklir Iran di Natanz.

Israel sangat tidak menginginkan adanya negara lain di kawasan Timur-Tengah

yang mempunyai senjata nuklir. Bagi Israel, adanya negara lain yang memiliki senjata nuklir akan mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Timur-Tengah. Dengan segala upayanya, Israel terus berusaha menghentikan program nuklir Iran. Propaganda tersebut diharapkan mampu mempengaruhi pemerintah Iran dan negara lainnya di dunia. Dengan serangan militernya ke reaktor nuklir Iran, selain ingin menjaga stabilitas keamanan di kawasan, Israel juga ingin tetap memiliki monopoli kontrol dan menjaga supremasi kekuatan militernya yang tidak tertandingi di Kawasan Timur Tengah.

Meningkatnya kekuatan militer dan hegemoni Iran di Timur Tengah dianggap mempunyai tujuan menjadi kekuatan dominan di wilayah Timur Tengah, sekaligus menjadi pesaing Israel. Iran dan Israel sama-sama menginginkan menjadi kekuatan yang dominan di wilayah Timur-Tengah setelah hancurnya Irak akibat invasi AS. Israel terlihat sangat didukung AS untuk mengatur semua kebijakannya yang menyangkut dominasi kekuatan dalam hal apapun, walau ditentang banyak negara.

Israel sendiri sebenarnya telah memiliki senjata nuklir sejak tahun 1960-an dan hingga saat ini diperkirakan telah mencapai jumlah antara 100 hingga 200 hulu ledak. Beberapa dari senjata itu bahkan telah ditempatkan di kapal selam dan pesawat terbang pembawa rudal sehingga Israel hampir kebal terhadap serangan *preemptive*. Ironisnya, Israel tidak pernah menandatangani Perjanjian Non-proliferasi Nuklir dan karenanya

tidak pernah berada dalam tekanan rezim inspeksi internasional. Sebaliknya, Iran merupakan negara pihak dalam perjanjian Non-proliferasi Nuklir sehingga semua program nuklirnya masih berada di bawah pengawasan internasional oleh IAEA.

Dalam konteks ini, Iran yang merupakan negara penandatangan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir dan berhak untuk mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan sipil berusaha dicegah oleh Israel yang bukan negara penandatangan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir. Kondisi seperti ini memperlihatkan sikap IAEA yang ambigu, karena di satu sisi akan mengawasi Iran sementara di sisi lain tidak berani mengambil sikap tegas terhadap Israel, meskipun Israel telah mengembangkan senjata nuklir untuk kepentingan militer. Dukungan kuat AS terhadap Israel membuat IAEA ragu mengambil tindakan terhadap Israel.

Penutup

Stabilitas politik dan keamanan di Timur Tengah akan terganggu selama Israel mengetahui adanya negara lain di kawasan yang akan mempunyai senjata nuklir. Iran yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar serta pengaruh luas di Timur Tengah dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi Israel jika sampai mempunyai senjata nuklir. Sebelum hal itu terjadi maka Israel akan selalu melakukan sabotase untuk merusak program nuklir Iran. Kendati demikian, di masa depan, negara-negara di kawasan Timur Tengah yang kaya akan sumber daya minyak bumi, memerlukan suatu kerangka kerja sama keamanan regional yang

melibatkan semua pihak, baik negara pemilik nuklir maupun non-nuklir, untuk menciptakan penyelesaian damai secara berkelanjutan.

Kesepakatan JCPOA tahun 2015 merupakan produk diplomasi multilateral yang mengikat berdasarkan Resolusi DK PBB No. 2231 untuk menyelesaikan masalah nuklir Iran tapi sayangnya tidak melibatkan Israel. Bila komunitas internasional tidak melakukan langkah perlindungan demi memastikan implementasi yang seimbang dengan itikad baik dari seluruh negara yang tergabung maka perjanjian seperti dalam JCPOA tidak akan berhasil. Dunia, khususnya AS, juga harus dapat memaksa Israel untuk menandatangani perjanjian proliferasi nuklir, agar negara itu tidak bertindak semena-mena dalam perilakunya di kawasan.

Referensi

- “Arab Saudi Prihatin atas Langkah Iran”, *Kompas*, 15 April 2021, hal. 4.
- “Indonesia, Iran Aim to Finalize Preferential Trade Agreement”, *The Jakarta Post*, 21 April 2021, hal. 2.
- “Iran Hentikan Kerja Sama dengan UE”, *Media Indonesia*, 14 April 2021, hal. 14.
- “Iran Tingkatkan Pengayaan Uranium”, *Media Indonesia*, 15 April 2021, hal. 14.
- “Iran blames Israel for Natanz Nuclear Plant Outage, Vow Revenge”, *The Jakarta Post*, 13 April 2021, hal. 4.
- “Israel dituding Serang Fasilitas Nuklir”, *Media Indonesia*, 13 April 2021, hal. 13.
- Katman, Kenneth. 2021. “Iran’s Foreign and Defence Policies”,

CRS Report, 11 Januari 2021.
 “Mossad di Balik Serangan ke Instalasi Nuklir Iran”, *Kompas*, 13 April 2021, hal. 4.
 “Pembicaraan Nuklir di Wina Banyak Kemajuan”, *Media Indonesia*, 19 April 2021, hal. 14.
 Rocca, Noemi M. 2021. “Iran’s Geopolitics in Eurasia After the Nuclear Deal,” *Cambridge Journal of Eurasian Studies*, 2017, 1: #ZHTK8T, <https://doi.org/10.22261/ZHTK8T>, diakses 19 April 2021

“Sabotase Natanz Jadi Pertaruhan Buruk”, *Kompas*, 14 April 2021, hal. 4.
 “60 Percent Enrichment Response to Israel’s Nuclear Terrorism: Iran”, *The Jakarta Post*, 15 April 2021, hal. 9.



Humphrey Wangke
humphrey.wangke@dpr.go.id

Dr. Humphrey Wangke, M.Si. Menyelesaikan Pendidikan S1 Hubungan Internasional tahun 1988 di FISIP Universitas Jember dan pendidikan S2 tahun 1998 pada Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Pada tahun 2018 menyelesaikan studi S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Kepakaran Isu-Isu politik Strategis Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa Karya tulis yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Diplomasi Indonesia dan Pembangunan Konektivitas Maritim (2018)", "Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan (2017)", "Solving the Problem of Illegal Logging through the Implementation of the Model of Partnership Between Balai TNK and the Local Community (The Case Study of Illegal Logging in TNK, East Kalimantan (2017)", "The Management of Kutai National Park through the Multi-stakeholder Partnership (2017)".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.